



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
UNIT KERJA : BALAI BESAR POM SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RUSTYAWATI
2. Jabatan : KEPALA BALAI BESAR
3. NHK : 173152

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.920.650.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 228 m²/318 m² di KAB / KOTA DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 585.000.000
2. Tanah Seluas 153 m² di KAB / KOTA DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 191.250.000
3. Tanah Seluas 8440 m² di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 295.400.000
4. Tanah Seluas 10000 m² di KAB / KOTA ---, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m²/30 m² di KAB / KOTA DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
6. Tanah Seluas 178 m² di KAB / KOTA DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 249.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 64.500.000

1. MOBIL, DAIHATSU XENIA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOTOR, YAMAHA YAMAHA MIO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 44.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 3.045.135



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.032.195.135

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.032.195.135

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.